

DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

KEGIATAN BADAN PEKERJA
PEMILIHAN ANGGOTA
(BPPA) DEWAN PERS

“PENINGKATAN
INDEKS KEMERDEKAAN
PERS PAPUA”

PENYELESAIAN
PENGADUAN PERS
DESEMBER 2021

ANUGERAH DEWAN PERS 2021 UNTUK KEMERDEKAAN PERS INDONESIA



DEWANPERS

ANUGERAH
DEWAN PERS 2021



ANUGERAH DEWAN PERS
TAHUN 2021

ANUGERAH DEWAN PERS 2021 UNTUK KEMERDEKAAN PERS INDONESIA



Dewan Pers pada tahun 2021 untuk pertama kalinya memberikan apresiasi kepada insan pers, perusahaan pers, lembaga dan perorangan non pers di tanah air yang turut berkontribusi mewujudkan kemerdekaan pers di Indonesia melalui kegiatan Anugerah Dewan Pers. Anugerah Dewan Pers tersebut diharapkan mampu menjadi pemicu semangat dan apresiasi untuk memperjuangkan kemerdekaan pers di Indonesia. Malam penganugerahan acara digelar pada hari Kamis, 9 Desember 2021 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Melalui anugerah ini kita membangun budaya untuk mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada yang berprestasi. Penghargaan ini sebagai simbol ajakan kepada kita semua ayo kepada siapapun yang berprestasi kita berikan apresiasi sehingga budaya berprestasi ini bisa tumbuh dan menjadi motivasi lebih



A (DARI KANAN) KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH, GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, ANSAR AHMAD, GUBERNUR JAWA BARAT, RIDWAN KAMIL, DAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ISRAN NOOR, BERFOTO BERSAMA USAI PENYERAHAN TROFI ANUGERAH DEWAN PERS 2021 UNTUK KATEGORI INDEKS KEMERDEKAAN PERS PADA KAMIS (9/12) DI JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

kuat lagi dikemudian hari,” ujar Ketua Dewan Pers M. Nuh berkostum batik coklat saat membuka acara.

Tokoh pers nasional, Konstituen Dewan Pers, serta dari lembaga tinggi negara turut hadir dalam acara yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang diwakili staf ahli Kominfo Niken Widiastuti, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Perwakilan dari Gubernur Kalimantan Timur, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Agung Suprio.

Hadir pula para Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, anggota Dewan Pers Arif Zulkifli, Agung Dharmajaya, Agus Sudibyo, Ahmad Djauhar, Asep Setiawan, Hassanein Rais dan Jamalul Insan. Selain itu hadir sejumlah tokoh pers diantaranya adalah Ishadi SK, Peter F Gonta, Uni Lubis, Rikard Bangun, Fachry Mohammad, Meidyatama Suryodiningrat serta insan pers lainnya.

“Dalam masa pandemi ini tugas jurnalistik ini menjadi lebih berat karena mendapatkan tantangan dan tekanan serta kesulitan. Oleh karena itulah Dewan Pers bersama Konstituen Dewan Pers menyelenggarakan Anugerah Dewan Pers dengan tema perjuangan dalam mewujudkan Kemerdekaan Pers di Indonesia,” ungkap Anggota Dewan Pers Asep Setiawan selaku Ketua Panitia Anugerah Dewan Pers 2021.

Dalam pelaksanaannya Dewan Pers bekerjasama dengan 10 konstituen Dewan Pers yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Selain itu ikut

berkontribusi dalam menunjang kegiatan ini adalah Pertamina, Federal International Finance (FIFGROUP) dari kelompok Astra dan pendiri Triputra Group Teddy Rachmat.

Penjaringan karya nomine yang dinilai adalah periode September 2020 - hingga September 2021 yang diajukan oleh Konstituen Dewan Pers. Terdapat 25 kategori yang diberikan apresiasi dalam Anugerah Dewan Pers 2021 yakni kategori wartawan media cetak, wartawan radio, wartawan televisi dan wartawan media siber. Selanjutnya, ada kategori perusahaan pers atau media yakni media cetak, media radio, media televisi dan media siber.

Anugerah Dewan ini tidak hanya di tingkat nasional. Penghargaan juga mengakomodasi dan memberi kesempatan kepada media daerah di seluruh Indonesia yakni media cetak, radio, siber, tv lokal wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur. Selain itu ada juga kategori kepeloporan lembaga non pers yang turut mewujudkan kemerdekaan pers di Indonesia, kepeloporan perorangan non pers yang turut mewujudkan kemerdekaan pers di Indonesia. Selain itu terdapat kategori Provinsi yang menjadi tiga besar terbaik dalam mewujudkan kemerdekaan pers di Indonesia yang masuk dalam survei Indeks Kemerdekaan Pers 2021.

Proses penyelenggaraan Anugerah Dewan Pers ini dimulai dengan konsultasi kepada Konstituen Dewan Pers dan Masyarakat Pers untuk merumuskan tujuan, kriteria dan kategori Anugerah Dewan Pers. Bahkan proses pengajuan nomine Anugerah Dewan Pers disampaikan oleh Konstituen Dewan Pers. Dari proses ini terdapat 117 media dengan ratusan karya jurnalistik, 45 wartawan dan 13 lembaga dan 20 tokoh. Akhirnya dewan juri mengajukan 41 nomine dari kategori media cetak, tele-



Melalui anugerah ini kita membangun budaya untuk mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada yang berprestasi. Penghargaan ini sebagai simbol ajakan kepada kita semua ayo kepada siapapun yang berprestasi kita berikan apresiasi sehingga budaya berprestasi ini bisa tumbuh dan menjadi motivasi lebih kuat lagi dikemudian hari.”

Mohammad NUH
Ketua Dewan Pers

visi, radio dan siber serta perorangan dan lembaga.

Sebanyak 41 nomine ini terjaring dari penilaian juri utama yang terdiri dari Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, Ketua Umum PWI Atal S. Depari, Ketua Dewan Pers 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo, Wartawan Senior Bambang Harymurti dan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Dadang Rahmat Hidayat. Sedangkan juri penyisihan adalah anggota Dewan Pers Hendry Ch Bangun, Ahmad Djauhar, Jamalul Insan dan Asep Setiawan.

Proses penjurian awal telah dimulai pada bulan November 2021 dengan sejumlah tiga sampai lima unggulan di setiap kategori. Para unggulan ini telah melalui tahap penjurian awal. Dalam rencana awal terdapat 22 kategori wartawan dan media serta satu kategori perorangan dan satu kategori lembaga.

Pada 15 November 2021 telah diumumkan nama nomine kepada publik melalui pers rilis agar masyarakat dapat memberikan masukan mengenai para nomine yang terdiri dari kategori media, wartawan, perorangan dan lembaga. Komentar dan pendapat publik terhadap nomine Anugerah Dewan Pers 2021 dibuka sampai 27 November 2021.

Untuk setiap peraih penghargaan Dewan Pers memberikan trofi khusus yang didesain oleh seniman Dolorosa Sinaga. Peraih Anugerah Dewan Pers juga mendapatkan sertifikat penghargaan dan hadiah dalam bentuk uang. Namun peraih penghargaan tiga besar Indeks Kemerdekaan Pers hanya menerima trofi dan sertifikat penghargaan.

Adapun peraih penghargaan Anugerah Dewan Pers sebagai berikut:

1. Kategori Wartawan Cetak
Wahyu Dhyatmika - Majalah Tempo



A PARA PENERIMA PENGHARGAAN BERSAMA ANGGOTA DEWAN PERS, DAN PARA JURI BERFOTO BERSAMA USAI ACARA ANUGERAH DEWAN PERS 2021 PADA KAMIS (9/11) DI JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

2. Kategori Media Cetak Majalah Tempo
3. Kategori Wartawan Televisi Rahdhini Ika-ningrum - Metro TV
4. Kategori Media Televisi Kompas TV
5. Kategori Media Siber kompas.id
6. Kategori Media Siber Wilayah Indonesia Bagian Barat kabarmedan.com
7. Kategori Media Siber Wilayah Indonesia Bagian Tengah kabarmakassar.com
8. Kategori Wartawan Radio Haryo Ristamaji - Radio Elshinta
9. Kategori Media Radio RRI Pro3 FM
10. Kategori Media Radio Wilayah Indonesia Bagian Barat Suara Surabaya
11. Kategori Perorangan Non Pers Damar Juniarto – Safenet (Southeast Asia Freedom of Expression Network)
12. Kategori Lembaga Non Pers Lembaga Bantuan Hukum Pers

13. Kategori Indeks Kemerdekaan Pers
 - a) Peringkat 1 Provinsi Kepulauan Riau
 - b) Peringkat 2 Provinsi Jawa Barat
 - c) Peringkat 3 Provinsi Kalimantan Timur

Dalam kesempatan pemberian Anugerah Dewan Pers, panitia pelaksana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan dukungan untuk terselenggaranya acara ini Pertamina, FIFGroup dari Astra dan perorangan yang turut mendukung yakni Teddy Rachmat.

Kegiatan Anugerah Dewan Pers yang direncanakan berlangsung setiap tahun merupakan salah satu upaya terbaik Dewan Pers untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi insan pers dan media serta semua lembaga dan masyarakat yang turut andil dalam mewujudkan kemerdekaan pers di Indonesia. ●

(Imam Suwandi)

UJI KOMPETENSI WARTAWAN DESEMBER 2021



A WAKIL KETUA DEWAN PERS, HENDRY CH BANGUN (DI PODIUM) DI DAMPINGI OLEH ANGGOTA DEWAN PERS, M. AGUNG DHARMAJAYA (PALING KANAN) SAAT MEMBUKA UJI KOMPETENSI WARTAWAN YANG DI FASILITASI OLEH DEWAN PERS PADA SENIN (13/12) DI MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT. (FOTO: DEWAN PERS)

Dewan Pers terus berupaya meningkatkan Kemerdekaan Pers dan kualitas jurnalisme di Indonesia melalui program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di berbagai Provinsi. Selain melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan, Dewan Pers juga menggelar program *Training for Trainer* Calon Penguji dan Administrator Lembaga Uji Kompetensi Wartawan.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun membuka Uji Kompetensi Wartawan yang difasilitasi oleh Dewan Pers pada Selasa 21 Desember 2021 di Medan, Sumatera Utara. Pembukaan acara tersebut dihadiri oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara Farianda Putra Sinik dan Wakil Sekjen PWI Pusat Suprpto diikuti 60 orang peserta dilaksanakan selama dua hari.



▲ WAKIL KETUA DEWAN PERS HENDRY CH. BANGUN (KETIGA DARI KANAN) SAAT MENGHADIRI UJI KOMPETENSI WARTAWAN YANG DI FASILITASI OLEH DEWAN PERS PADA SELASA (21/12) DI MEDAN, SUMATERA UTARA. (FOTO: DEWAN PERS)

Selain itu, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun membuka Acara Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan bersama Lembaga Uji Kompetensi Wartawan pada Senin 27 Desember 2021 di Tangerang Selatan, Banten. Hadir dalam acara daring dan luring tersebut Anggota Dewan Pers Jamalul Insan, Anggota Dewan Pers Hassanein Rais, Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar dan 12 Lembaga Uji Kompetensi serta Anggota Pokja dari Komisi Pelatihan, Pendidikan dan Pengembangan Profesi.

Masih pada bulan Desember, Anggota Dewan Pers Jamalul Insan membuka Pelatihan *Training for Trainer* Calon Penguji dan Administrator Lembaga Uji Kom-

*Kegiatan Pelatihan
Jurnalistik dan
Uji Kompetensi
Wartawan (UKW)
yang difasilitasi
Dewan Pers
pada 2021 telah
terlaksana di 34
provinsi.*

petensi Wartawan Universitas Dr Soetomo pada Sabtu, 11 Desember 2021 di Surabaya. Di tengah acara tersebut Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pers Dewan Pers menyerahkan SK Dewan Pers tentang penetapan Universitas Dr Soetomo sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan kepada Rektor Siti Marwiyah.

Kegiatan Pelatihan Jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang difasilitasi Dewan Pers pada 2021 telah terlaksana di 34 provinsi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan Indonesia telah terselenggara sebanyak 41 kegiatan oleh 12 Lembaga Uji Kompetensi Wartawan. ● (Imam Suwandi)

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2021

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh membuka acara Refleksi Akhir Tahun 2021 Dewan Pers pada 9 Desember 2021 di Hotel Sultan, Jakarta. Dalam acara tersebut hadir Anggota Dewan Pers, Perwakilan Konstituen dan Tokoh Pers juga Tenaga Ahli Dewan Pers dan Staf Sekretariat Dewan Pers.

“Yang masih menjadi fokus kita adalah terkait dengan kebebasan atau Kemerdekaan Pers yang dikaitkan dengan tugas-tugas jurnalis di lapangan. Model-model tekanan dan kriminalisasi (masih ada) sehingga perlu kerjasama antar lembaga di antaranya Dewan Pers dengan Polri dalam menjaga dan melindungi para insan pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya,” ujar Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh saat membuka acara.

Lebih lanjut Ketua Dewan Pers menegaskan diselenggarakannya acara Refleksi Akhir Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi capaian pelaksanaan program Dewan Pers selama tahun 2021 dan harapan ke depan.

“ Kita sedang dalam proses untuk merampungkan transformasi digital layanan-layanan yang ada di Dewan Pers mulai migrasi memanfaatkan teknologi digital dengan demikian tahun 2022 kita harapkan sepenuhnya sudah full memanfaatkan teknologi digital dalam proses kegiatan yang ada di Dewan Pers,” ungkap M. Nuh.

Sementara itu anggota Dewan Pers Agus Sudibyo yang juga selaku Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional menyampaikan poin-poin penting tentang pencapaian komisi-komisi yang ada di Dewan Pers.

“ Industri media tahun depan merefleksikan dari apa yang terjadi di tahun ini. Yakni adalah tantangan untuk terus menjaga prinsip firewall (pagar api). Pada tahun 2021 tampaknya kolaborasi kemitraan antara media massa dengan pemerintah masih akan dominan. Di satu sisi pemerintah membutuhkan pers untuk proses informasi dan komunikasi terkait dengan pandemi dan itu sangat terasa betapa keberhasilan



A KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH SAAT MEMBUKA ACARA REFLEKSI AKHIR TAHUN 2021 PADA KAMIS (9/12) DI JAKARTA.
(FOTO: DEWAN PERS)

menangani pandemi ditentukan oleh proses komunikasi massa sehingga pemerintah sangat berharap pada kontribusi pers,” ungkap Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo.

Dalam masa pandemi ini keberlangsungan kehidupan pers sangat sulit untuk bisa bertahan. Terutama untuk Perusahaan Pers di daerah sudah semakin sulit mendapatkan iklan sebagai bagian dalam konteks untuk mendapatkan kehidupan bisnis. Pers di daerah sangat tergantung pada pemerintah untuk mendapatkan iklan dalam bentuk kerjasama.

Menurut Agus Sudibyo, terdapat contoh yang bagus yakni kerjasama Dewan Pers bersama Satgas Penanganan Covid-19 dan Konstituen Dewan Pers dalam

program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku. Dana lebih dari Rp 30 miliar dialokasikan oleh Satgas untuk memberikan Fellowship kepada sekitar 3050 wartawan se-Indonesia yang terlibat dalam program ini pada bulan Mei sampai November 2021. Program ini telah menghimpun 257.941 berita tentang pentingnya menjaga 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak). Dengan program ini menjaga protokol kesehatan tetapi menarik sekalipun Satgas penanganan pandemi tidak pernah memberikan pesan-pesan politik kepada peserta wartawan.

Tantangan selanjutnya bagi insan pers adalah bagaimana membangun media secara jurnalisme, bisnis dan teknologi yang

berkelanjutan. “Kita upayakan tahun depan bagaimana pemberitaan media itu tidak sekedar menyampaikan fakta, menaati kode etik tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan publik,” tambah Agus Sudibyo.

Dewan Pers juga memfasilitasi Konstituen Dewan Pers untuk merumuskan bentuk regulasi tentang *publisher right* dengan mempelajari apa yang ada di luar negeri agar bisa diadaptasikan untuk kebutuhan dalam negeri. Menutup uraiannya, Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo juga menyampaikan apresiasinya kepada semua undangan yang hadir yakni dari Anggota Dewan Pers, Konstituen Dewan Pers, Tokoh Pers Nasional dan Insan Pers. ●
(Reynaldo dan Fadli)

KEGIATAN BADAN PEKERJA PEMILIHAN ANGGOTA (BPPA) DEWAN PERS

Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers telah melaksanakan rapat dengan Agenda Menentukan Calon Anggota Dewan Pers periode 2022-2025 pada Kamis 2 Desember 2022 di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Dalam acara yang dipimpin Ketua BPPA Syafril Nasution didampingi Sekretaris BPPA Jajang Jamaludin yang dihadiri anggota BPPA secara hibrid telah memutuskan 18 nama calon Anggota Dewan Pers ditetapkan terdiri atas 6 calon dari unsur tokoh masyarakat, 6 calon dari unsur wartawan, dan 6 calon dari pimpinan perusahaan pers.

Pada hari Jumat, 3 Desember 2021 BPPA telah mempublikasikan Pers Rilis melalui website resmi dewanpers.or.id yang berisi Siaran Pers tentang pengumuman 18 Nama Calon Anggota Dewan Pers.

Sebanyak 18 nama calon tersebut ditetapkan dalam rapat BPPA pada Kamis, 2 Desember 2021

di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, yang terdiri atas 6 calon dari unsur tokoh masyarakat, 6 calon dari unsur wartawan, dan 6 calon dari pimpinan perusahaan pers.

Berikut nama-nama calon Anggota Dewan Pers tersebut (berdasar urutan abjad). Enam Calon Anggota Dewan Pers Unsur Tokoh Masyarakat:

1. Asep Setiawan
2. Atmaji Sapto Anggoro
3. Azyumardi Azra
4. Irwa R Zarkasi
5. Ninik Rahayu
6. Rajab Ritonga

Enam Calon Anggota Dewan Pers Unsur Wartawan:

1. Abdul Manan
2. Arif Zulkifli
3. Jamalul Insan
4. Paulus Tri Agung Kristanto
5. Wahyu Triyogo
6. Yadi Heriyadi Hendriana



A BADAN PEKERJA PEMILIHAN ANGGOTA (BPPA) DEWAN PERS SAAT MELAKSANAKAN RAPAT DALAM AGENDA MENENTUKAN CALON ANGGOTA DEWAN PERS PERIODE 2022-2025 PADA KAMIS (2/12) DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

Enam Calon Anggota Dewan Pers Unsur Pimpinan Perusahaan Pers:

1. Asmono Wikan
2. M Agung Dharmajaya
3. M Rafiq
4. Metta Dharma Saputra
5. Muhammad Nasir
6. Totok Suryanto

Mereka dipilih dari 28 nama bakal calon yang masuk ke BPPA hingga penutupan pendaftaran pada Jumat, 26 November 2021. BPPA meminta masyarakat untuk memberikan masukan atas nama-nama calon anggota Dewan Pers tersebut. Masukan ditunggu hingga Kamis, 16 Desember 2021, yang dikirim ke alamat surat elektronik sekretariat@dewanpers.or.id atau ke alamat Sekretariat BPPA Dewan Pers, Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jl. Kebon Sirih

No. 32 Jakarta Pusat (Telp. 021-3504877-75).

Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers Menggelar Rapat Pemilihan Anggota Dewan Pers periode 2022-2025 pada Senin 20 Desember 2021 di Gedung Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Dalam rapat daring tersebut dihadiri anggota BPPA dari perwakilan Konstituen Dewan Pers, Anggota Dewan Pers dan Tim Sekretariat Dewan Pers.

Masukan dari masyarakat akan ditindaklanjuti apabila menyertakan nama, identitas, dan nomor telepon sebagai bagian verifikasi keabsahan masukan. BPPA menjamin kerahasiaan identitas pemberi masukan. Masukan dari masyarakat ini akan menjadi pertimbangan BPPA dalam menetapkan sembilan anggo-

ta Dewan Pers terpilih yang di-gendakan pada Januari 2022.

PEMBENTUKAN BPPA

Masa jabatan Anggota Dewan Pers periode 2019-2022 akan berakhir pada bulan Mei 2022 mendatang. Persiapan estafet kepemimpinan untuk pemilihan Anggota Dewan Pers periode 2022-2025 telah disiapkan dengan membentuk Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers periode 2022-2025.

Ketua Dewan Pers Mohammad NUH memberikan sambutan pada rapat perdana Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers periode 2022-2025 pada hari Senin, 1 November 2021 di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

“Salah satu tanggung jawab yang besar dalam kepemimpinan



A BADAN PEKERJA PEMILIHAN ANGGOTA (BPPA) DEWAN PERS SAAT MENDENGARKAN PAPARAN DARI PARA CALON ANGGOTA DEWAN PERS PERIODE 2022-2025 PADA KAMIS (2/12) DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

sebuah lembaga adalah bagaimana pergantian atau estafet kepemimpinan itu berjalan dengan lebih baik, tugas Dewan Pers di masa mendatang bukan lebih mudah namun justru akan menghadapi perhelatan pergantian kepemimpinan di Indonesia. Oleh karena itu membutuhkan kesiapan Dewan Pers agar bisa terus menjaga marwahnya,” ujar Ketua Dewan Pers Mohammad NUH dalam sambutannya melalui media daring.

Dalam rapat tersebut terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris BPPA Dewan Pers Periode 2022-2025 yakni Syafril Nasution dan Sekretaris Jajang Jamaludin. Selain pemilihan Ketua dan wakil ketua, BPPA yang sudah terben-

tuk tersebut juga melaksanakan tugas untuk menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers periode 2020-2025. Acara tersebut dihadiri Anggota Dewan Pers dan Konstituen Dewan Pers.

Dalam agenda selanjutnya, Ketua Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers 2022-2025 Syafril Nasution membuka rapat dengan agenda Pembahasan Kriteria dan Pengumuman Pembukaan Pencalonan Anggota Dewan pers, Periode 2022-2025 pada Selasa, 9 November di Hall Dewan Pers, Jakarta. Acara tersebut dihadiri Sekretaris BPPA Jajang Jamaludin serta Ketua atau Perwakilan Konstituen Dewan Pers yang telah dipilih

menjadi anggota BPPA.

Berikutnya, Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers menggelar Rapat Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas administratif, calon anggota Dewan Pers periode 2022-2025 pada Senin, 29 November 2021 di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Acara yang dipimpin Ketua BPPA Syafril Nasution dihadiri anggota BPPA secara daring Atal S. Depari, sementara yang hadir secara langsung yakni Bambang Santoso, Firdaus, Hendra Eka, Herik Kurniawan, Jajang Jamaludin, Syamsuddin Hadi Sutarto, Wenseslaus Manggut juga Wakil dari Anggota Dewan Pers Hendry Ch Bangun, Ahmad Djauhar dan Agus Sudibyo. ● (Imam Suwandi)

PERESMIAN RUANG PELAYANAN PUBLIK DEWAN PERS



▲ PROSESI PEMOTONGAN TUMPENG OLEH KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH SAAT PERESMIAN RUANG PELAYANAN PUBLIK DEWAN PERS YANG TURUT DI HADIRI OLEH ANGGOTA DEWAN PERS, TENAGA AHLI DEWAN PERS, DAN SEKRETARIAT DEWAN PERS PADA KAMIS (9/12) DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya insan pers telah diresmikan penggunaan Ruang Layanan Publik Dewan Pers. Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh meresmikan Ruang Layanan Publik Dewan Pers di lantai dua Gedung Dewan Pers pada Kamis 9 Desember 2021 di Jakarta.

Dalam acara seremonial pemotongan pita sebagai tanda dibukanya Ruang Pelayanan Publik tersebut dihadiri hampir semua Anggota Dewan Pers, Perwakilan Konstituen dan Tokoh Pers juga sejumlah Tenaga Ahli Dewan Pers

serta staf sekretariat Dewan Pers.

“Saya ingin memberikan pesan dalam pembukaan ruang pelayanan publik ini bahwa kita harus menjaga kebersamaan. Itulah mengapa saya mengajak memotong pita dengan dipotong secara bersama. Selain itu saya berharap upaya (penyediaan ruang layanan publik) ini ada manfaatnya untuk kehidupan pers di masa mendatang,” ungkap Mohammad NUH dalam sambutannya.

Setelah memotong pita sebagai tanda dibukanya ruang pelayanan publik, Mohammad NUH juga menandatangani plakat bersama delapan Anggota Dewan Pers juga oleh Sekretaris Dewan Pers Saefudin.

Bagian Pelayanan Publik ini terdiri dari beberapa ruang yakni pada bagian depan terdapat ruang tamu, meja pelayanan bagian pendataan perusahaan pers, meja pelayanan bagian pelayanan pengaduan dan meja pelayanan bagian *call center* dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Di ruang dalam terdapat ruang kerja Tenaga Ahli Dewan Pers dan ruang rapat pimpinan yang dilengkapi perangkat multimedia. Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama insan pers di Indonesia. ● (Imam Suwandi)

“PENINGKATAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS PAPUA”

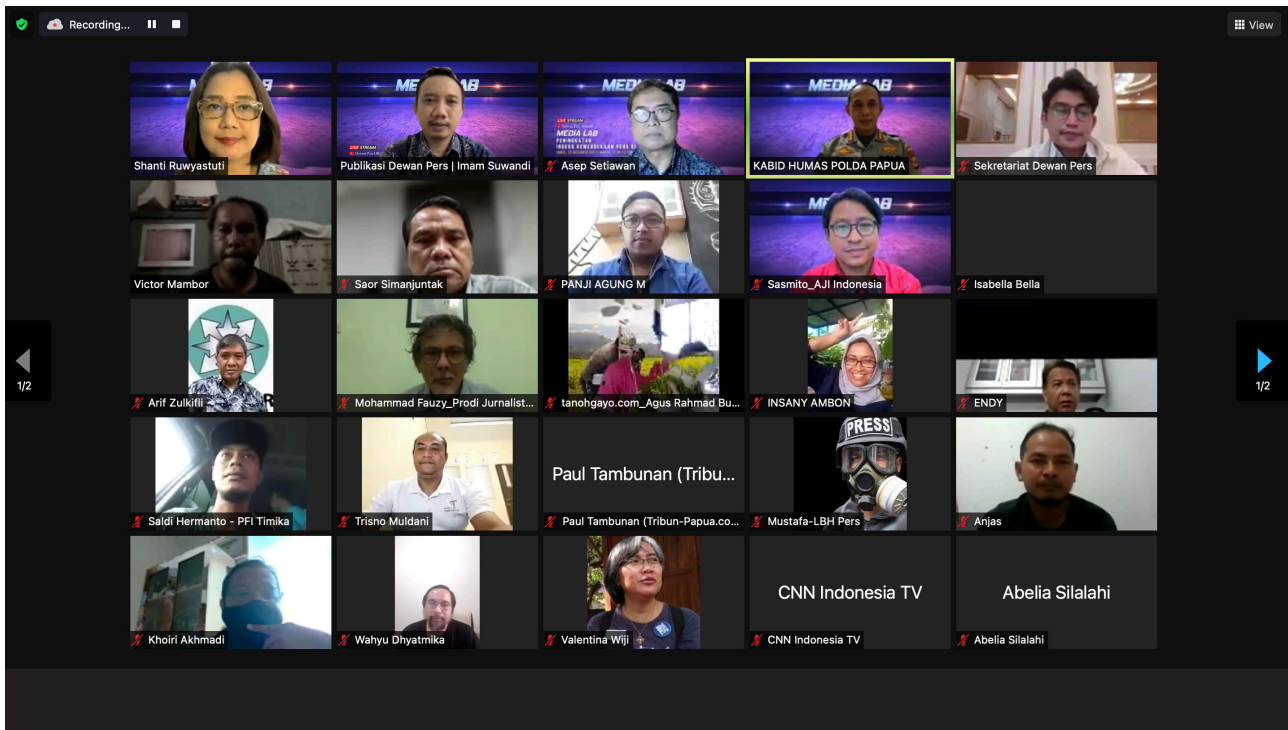
Oleh: **SHANTI RUWYASTUTI**
Tenaga Ahli Dewan Pers



Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2021 memperlihatkan Papua dan Papua Barat pada posisi tiga terbawah dari 34 provinsi. Skor IKP Papua dalam angka 68,7 atau posisi 33 yang menunjukkan kemerdekaan pers agak bebas, indikasi banyak tantangan bagi pers di provinsi ini. Dalam IKP 2018 sampai 2019, posisi Papua berada di peringkat 34 dari 34 provinsi.

Demikian juga skor IKP tahun 2021 di Papua Barat menduduki posisi ke 32 dari 34 provinsi. Angka IKP di Papua Barat adalah 70,59 atau dalam level cukup bebas yang menunjukkan posisi lebih baik dari Papua. Namun demikian posisi ini masuk dalam kategori terbawah juga yang menunjukkan banyak tantangan di provinsi ini. Peringkat Papua Barat tahun 2018 pada posisi ke-32, lalu tahun 2019 peringkat 28 dan turun kembali pada tahun 2020 pada angka 34.

Dua provinsi paling timur Indonesia ini tidak lepas dari peringkat ketiga terbawah meski Papua Barat pernah berada di angka 28. Angka yang rendah ini memperlihatkan berbagai tantangan dalam mewujudkan kemerdekaan pers di sana. Tidak



▲ DEWAN PERS SAAT MENGADAKAN DISKUSI MEDIA LAB DENGAN TEMA “PENINGKATAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PAPUA” YANG DILAKSANAKAN SECARA DARING MELALUI ZOOM DAN DI TAYANGKAN SECARA LANGSUNG MELALUI KANAL YOUTUBE DEWAN PERS PADA KAMIS (23/12). (FOTO: DEWAN PERS)

hanya survei dari Dewan Pers, beberapa lembaga internasional juga menunjukkan sejumlah tantangan berat dalam kemerdekaan pers di kawasan ini.

Menurut Undang Undang Pers No 40 Tahun 1999, kemerdekaan pers merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Dengan membaiknya skor kemerdekaan pers maka ada langkah maju dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Ini juga berarti bahwa skor yang tinggi kemerdekaan pers di Indonesia menjadi indikator adanya peningkatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti pula indikator positif dalam kehidupan demokrasi yang semakin menyejahterakan masyarakat.

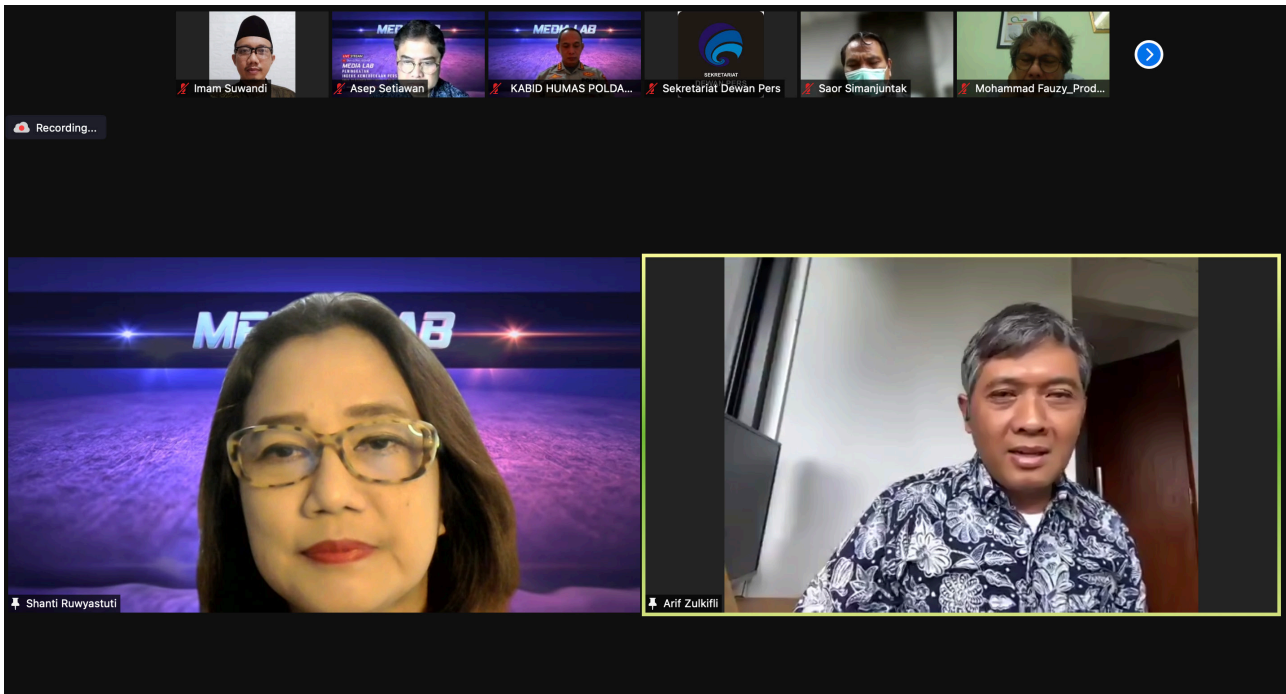
Berdasarkan latar belakang itulah masyarakat Pers Indonesia perlu meningkatkan kepedulian

untuk menguatkan kemerdekaan pers di Papua dan Papua Barat. Penguatan pers di Papua juga merupakan salah satu rekomendasi Survei IKP melalui berbagai kegiatan termasuk pembentukan Pokja atau Gugus Tugas Papua. Topik inilah yang diangkat di dalam Media Lab Dewan Pers 23 Desember 2021 “Peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers di Papua” dengan pembicara anggota Dewan Pers Arif Zulkifli, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Sasmito Madrim, Editor Tabloid Jubi Victor Mambor dan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ahmad Musthofa Kamal.

Arif Zulkifli menjelaskan Survei Indeks Kemerdekaan Pers merupakan kegiatan rutin Dewan Pers untuk mengukur tingkat kebebasan pers di Indonesia

berdasarkan persepsi publik. IKP disusun dengan metode survei tatap muka dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap pemangku kepentingan pers di suatu daerah. Karena survei persepsi, IKP tidak mengukur fakta kebebasan pers, melainkan persepsi responden terhadap kebebasan pers. IKP bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan, mencari titik kuat dan titik lemah dan memberikan masukan kepada pemangku kepentingan tentang kebebasan pers di suatu daerah.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers ini menjelaskan beberapa fakta eksternal dan internal yang mempengaruhi kebebasan pers, termasuk di Papua dan Papua Barat. Fakta eksternal antara lain pandangan yang



A ANGGOTA DEWAN PERS, ARIF ZULKIFLI (SEBELAH KIRI) SAAT MEMAPARKAN MATERI TENTANG INDEKS KEMERDEKAAN PERS PAPUA 2021 DI ACARA MEDIA LAB PADA KAMSI (23/12). (FOTO: DEWAN PERS)

salah terhadap kebebasan pers dan penyelesaian sengketa pers serta pandangan yang belum seragam tentang akses publik terhadap pers/media. Adapun fakta internal yang mempengaruhi kebebasan pers antara lain pemahaman yang buruk terhadap hakikat kerja jurnalistik dan hak dan tanggungjawab pers, termasuk kode etik jurnalistik, serta model bisnis pers itu sendiri.

Ibaratnya, kata Arif, jurnalistik itu berada pada sebuah koridor sempit yang dibatasi hak publik untuk tahu dan Kode Etik Jurnalistik. Mengapa publik berhak tahu? Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan, “Informasi merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.” Namun, Arif mengingatkan pers tetap harus dibatasi etika karena beberapa alasan berikut ini. Pertama, kebenaran jurnalistik bersifat relative. Kedua, pers bekerja dalam sekuel waktu dan tempat tertentu. Ketiga, pers mengejar kebenaran jurnalistik, bukan kebenaran hukum. Keempat, kerja pers dinilai dari kepatuhan pada prosedur bukan hasil akhir. Kelima, liputan

pers bisa salah, karenanya ia harus bisa dikoreksi.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Sasmito Madrim menyoroti kondisi di Papua berdasarkan variabel lingkungan fisik dan politik di dalam Survei IKP 2021, yaitu adanya 3 kasus kekerasan terhadap jurnalis, pentingnya informasi yang akurat dan berimbang, pentingnya akses atas informasi publik serta pentingnya pendidikan atas insan pers. Kasus kekerasan terhadap wartawan di Papua menimpa Editor Tabloid Jubi Victor Mambo (April 2021) dan Pemimpin Redaksi Cenderawasih Pos Lucky Ireuw (Agustus 2021) saat mobil mereka dirusak orang yang tidak dikenal. Kasus kekerasan juga terjadi pada jurnalis TVRI di Papua Barat Michael Jasman saat seseorang menembak ke arah rumahnya (Oktober 2021). Namun penegakan hukum terhadap ketiga kasus

ini, menurut Sasmito, kurang. AJI telah mengirim surat kepada Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri pada 16 Agustus 2021, namun belum ditanggapi.

Menurut Sasmito, selain mengalami kekerasan, jurnalis di Papua juga sulit mendapatkan akses terhadap informasi yang akurat. Pemerintah memblokir internet di Papua pada tahun 2019 dan 2020 sehingga AJI berinisiatif menggugat ke PTUN. Demikian pula pada tahun 2021 internet putus di Papua sehingga AJI meminta penjelasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menyoroti kondisi di Papua berdasarkan variabel hukum, kata Sasmito, AJI merasakan adanya kecurigaan dari pihak kepolisian saat AJI menyelenggarakan pelatihan jurnalis di Papua. Sasmito juga mempertanyakan kebijakan Pemerintah atas peliputan media asing di Papua. Adanya jurnalis asing yang merasa tidak nyaman didampingi oleh polisi saat melakukan peliputan di Papua. Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ahmad Musthofa Kamal, pendampingan polisi ini semata-mata demi keamanan wartawan asing dari serangan kelompok bersenjata dan memberikan gambaran daerah yang rawan untuk dikunjungi.

Editor Tabloid Jubi Victor Mambor menyebut kekerasan terhadap wartawan secara digital dalam bentuk bullying, hacking, hoax dan disinformasi perlu dimasukkan ke dalam Survei IKP. Victor menyoroti profesionalisme wartawan di Papua. Kata Victor, berdasarkan survei terhadap 300 media online di Papua dan Papua Barat, hanya 30 yang memenuhi standar perusahaan pers. Me-

dia yang sudah diverifikasi Dewan Pers di Papua hanya 2 dan di Papua Barat hanya 1. Padahal, kata Victor, online media di Papua tidak tertarik mengejar klik, karena itu tidak pernah memakai click-bait, sehingga hanya tertarik menulis berita tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Victor juga menyoroti variabel lingkungan ekonomi dimana iklan-iklan di media massa Papua sebagian besar berasal dari Pemerintah. Perusahaan swasta di Papua yang

Adapun fakta internal yang mempengaruhi kebebasan pers antara lain pemahaman yang buruk terhadap hakikat kerja jurnalistik dan hak dan tanggungjawab pers, termasuk kode etik jurnalistik, serta model bisnis pers itu sendiri.

memasang iklan hanya sedikit, seperti Freeport dan Bank Papua.

Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ahmad Musthofa Kamal, bagi Polisi, tidak ada informasi rahasia untuk pers, namun bukan berarti semua yang terekspos bisa disebar. Contoh, saat melakukan peliputan unjuk rasa/konflik, tujuan utama media adalah mengabarkan atau menjelaskan informasi mengenai apa yang sedang terjadi di tempat kejadian. Namun karena

pengabaran yang terlalu berlebihan, efek terhadap publik adalah rasa takut dan ketidaknyamanan untuk hidup di negara ini. Kata Kamal, disinilah peran pers, kode etik untuk jurnalis, dan standar penayangan menjadi panduan bagi para jurnalis untuk meliput dan menayangkan berita. Kamal mengingatkan, jurnalis tidak bekerja berdasarkan dugaan namun harus didasarkan pada fakta.

Kamal lantas mengutip data dari Dewan Pers tentang media di Papua yang sudah diverifikasi Dewan Pers, yaitu seputarpapua.com, (Online) Bisnis Papua (cetak), Cenderawasih Pos (Cetak), Radar Sorong (Cetak), Indosiar Jayapura (TV), Trans TV Jayapura (TV), Trans 7 Jayapura (TV), Global TV Papua (TV), Metro TV Papua (TV), Harian Pagi Papua (Cetak), Tabloidjubi.com (Cetak dan online). Kamal menegaskan, untuk media yang belum terverifikasi dan belum jelas siapa penanggungjawabnya, jika terjadi pelanggaran UU ITE, media tersebut akan langsung diblokir. Dengan adanya verifikasi ini, penerapan UU ITE juga akan bisa dilakukan dengan lebih baik.

Sasmito memaparkan rekomendasi AJI untuk meningkatkan peringkat Indeks Kemerdekaan Pers Papua dan Papua Barat. Pertama, perlunya kolaborasi semua pemangku kepentingan. Kedua, membuat peta jalan kebebasan pers di Papua. Ketiga, adanya jaminan infrastruktur atas hak informasi. Selain itu, Dewan Pers akan menjalankan rekomendasi Survei IKP untuk melakukan penguatan pers di Papua melalui berbagai kegiatan, antara lain pembentukan Pokja atau Gugus Tugas Papua. ●

PENYELESAIAN PENGADUAN PERS DESEMBER 2021

Oleh: REZA ANDREAS

Sepanjang bulan Desember 2021 Komisi Pengaduan Dewan Pers menerima 44 (empat puluh empat) kasus pengaduan berbagai unsur, seperti dari Kementerian/Lembaga, pimpinan daerah, wartawan dan masyarakat umum. Dalam proses penyelesaian aduan, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi se-

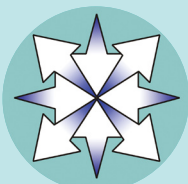
banyak 7 (tujuh) kali yang menghasilkan 12 (duabelas) risalah penyelesaian dan 5 (lima) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi, sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kasus diselesaikan melalui mekanisme ini.

KASUS PENGADUAN

Pada bulan Desember ini dari berbagai pengaduan yang diproses oleh komisi pengaduan salah satu yang menarik adalah pengaduan sebuah media melalui pemimpin redaksi/penanggungjawabnya ter-

hadap media lain yang memberitakannya bahwa salah satu wartawan yang bekerja di media merupakan wartawan abal-abal. Pengadu dalam kasus ini mengadukan enam media yang memberitakan soal wartawan Pengadu. Atas hal ini Dewan Pers kemudian memanggil pihak Pengadu dan Teradu dalam forum penyelesaian pengaduan. Dalam pertemuan tersebut hadir pengadu dan lima pengadu, Dewan Pers menemukan beberapa hal yaitu bahwa Teradu mengakui tidak melakukan konfirmasi kepada Pengadu,

Pengadu mengakui bahwa wartawan yang diberitakan memang bekerja di media Pengadu,



DEWANPERS

Berita Dewan Pers ETIKA: Terbit Bulanan, Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, ● Ketua: Mohammad Nuh, ● Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, ● Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhammad Agung Dharmajaya, Kepala Sekretariat: Saefudin. ● Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Mohammad Nuh, ● Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, ● Sekretaris Redaksi: Reza Andreas. ● Tim Redaksi: Marah Sakti Siregar, Rustam Fachri, Winarto, Shanti Ruwyastuti, Steffi Fatimah, Juni Soehardjo, Wawan Agus Prasetyo, Abdul Salam Fadli, Imam Suwandi, Reynaldo Adair, Sudarwanto Budi R. (Iwhan Gimbal).

Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.

Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id,

🐦 dewanpers 📷 @officialdewanpers 📘 Dewan Pers 📺 Dewan Pers

Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



A DEWAN PERS SAAT MELAKSANAKAN PENYELESAIAN PENGADUAN PERS ANTARA ENDANG SIDIN DENGAN ROTETERKINICOM DAN MEDIAREALITASCOM PADA HARI KAMIS (16/12) SECARA HIBRID DI TANGERANG SELATAN, BANTEN. (FOTO: DEWAN PERS)

dan berita-berita yang diunggah Teradu sudah dihapus berdasarkan permintaan dari Pengadu. Berdasar temuan tersebut Dewan Pers menilai bahwa keenam Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak menerapkan asas praduga tak bersalah, dan memuat opini yang menghakimi. Berita Teradu juga tidak sesuai dengan butir 2 huruf a dan b, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber terkait verifikasi dan keberimbangan berita, bahwa setiap berita harus melalui verifikasi, serta berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama

Dalam proses penyelesaian aduan, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak 7 (tujuh) kali yang menghasilkan 12 (duabelas) risalah penyelesaian dan 5 (lima) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Terakhir, pencabutan berita oleh Teradu tidak sesuai dengan butir 5 Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, yang mengatur tentang pencabutan berita. Berdasarkan penilaian tersebut Teradu wajib memuat hak jawab Pengadu disertai dengan permintaan maaf kepada masyarakat pembaca dan Pengadu. Dari 5 (lima) media yang dinilai oleh Dewan Pers 1 (satu) media menolak penilaian tersebut, untuk media yang menolak Dewan Pers memutuskan akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).



A ANGGOTA DEWAN PERS, ARIF ZULKIFLI MENDENGARKAN KETERANGAN DARI PIHAK PENGADU SAAT PELAKSANA PENYELESAIAN PENGADUAN PERS ANTARA ENDANG SIDIN DENGAN ROTETERKINICOM DAN MEDIAREALITASCOM PADA HARI KAMIS (16/12) SECARA HIBRID DI TANGERANG SELATAN, BANTEN. (FOTO: DEWAN PERS)

PENGADUAN 2021

Sebagai tambahan dari kasus pers selama Desember, Dewan Per selama tahun 2021 (periode Januari sampai dengan Desember 2021) melalui Komisi Pengaduan tercatat menerima sebanyak 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) kasus dan telah menyelesaikan 681 (enam ratus delapan puluh satu) kasus pengaduan atau 87,98% dari kasus yang diterima. Pengaduan yang diterima Dewan Pers sebagian besar merupakan pengaduan terhadap berita-berita yang ditayangkan melalui media siber. Setiap minggu Komisi Pengaduan melaksanakan pertemuan penyelesaian pengaduan rata-rata sebanyak tiga kali.

Mengingat situasi masih dalam kondisi pandemi, maka dalam menyelesaikan Pengaduan mas-

yarakat, Komisi Pengaduan lebih menekankan penyelesaian pengaduan melalui surat-menyurat dan bila menggelar pertemuan penyelesaian pengaduan menggunakan aplikasi *zoom* melalui mekanisme pertemuan hibrid.

Dalam penyelesaian melalui mekanisme surat menyurat ada dua bentuk, yakni Surat Penilaian Sementara dan Surat Penilaian Final. Surat Penilaian Sementara memerlukan persetujuan Pengadu dan Teradu. Bila para pihak setuju, Komisi Pengaduan akan mengeluarkan Surat Penilaian Final. Bila timbul ketidaksepakatan diantara para pihak, Komisi Pengaduan menggelar pertemuan mediasi untuk menghasilkan Risalah Penyelesaian Pengaduan atau PPR. Namun, untuk kasus-kasus yang sederhana atau

pelanggarannya jelas Komisi Pengaduan langsung mengeluarkan surat penilaian dan rekomendasi.

Pada periode ini dikeluarkan Surat Penilaian atas Pengaduan sebanyak 425 Surat dan Risalah sebanyak 122 Risalah. Selain itu, bila dalam mediasi diantara para pihak tidak terdapat titik temu atau salah satu pihak tidak setuju dengan draft Risalah yang disiapkan Komisi Pengaduan, maka kasusnya dibawa ke Sidang Pleno Dewan Pers untuk diputuskan melalui mekanisme Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), selama periode ini Dewan Pers telah mengeluarkan 46 PPR, selain itu ada pula kasus karena satu dan lain hal tidak diproses lebih lanjut namun diarsipkan, jumlah kasus yang diarsip sebanyak 88 kasus. ●



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Rilis Dewan Pers Pemenang Anugerah Dewan Pers 2021

Jakarta, Kamis

Dewan Pers mengumumkan peraih penghargaan Anugerah Dewan Pers 2021 di Jakarta hari Kamis (9/12). Anugerah Dewan Pers 2021 ini diselenggarakan dalam rangka memberikan apresiasi kepada wartawan, media massa, perorangan dan lembaga yang berkontribusi dalam mewujudkan kemerdekaan pers di Indonesia.

Pengumuman Anugerah Dewan Pers 2021 yang berlangsung Kamis malam ini dihadiri Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang diwakili staf ahli Kominfo Niken Widiastuti, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Agung Suprio. Hadir pula para anggota Dewan Pers, tokoh senior pers dan masyarakat pers lainnya.

Adapun peraih penghargaan Anugerah Dewan Pers sebagai berikut:

1. Kategori Wartawan Cetak
Wahyu Dhyatmika - Majalah Tempo
2. Kategori Media Cetak
Majalah Tempo
3. Kategori Wartawan Televisi
Rahdhini Ikaningrum - Metro TV
4. Kategori Media Televisi
Kompas TV
5. Kategori Media Siber
kompas.id

Prasetyo, Wartawan Senior Bambang Universitas Padjadjaran Dadang Rahmat Dewan Pers Hendry Ch Bangun, Ahmad I Untuk setiap peraih penghargaan I seniman Dolorosa Sinaga. Peraih An penghargaan. Demikian pula para peraih penghargaan. Demikian pula para peraih Pers, menerima sejumlah hadiah dalam terselenggaranya acara ini Pertamina, I tentang Anugerah Dewan Pers dapat dia

6. Kategori Media Siber
kabarmedan.com
7. Kategori Media Siber
kabarmakassar.com
8. Kategori Wartawan
Haryo Ristamaji
9. Kategori Media
RRI Pro3 FM
10. Kategori Media
Suara Surabaya
11. Kategori Perorangan
Damar Juni
12. Kategori Lembaga
Lembaga Bantuan Hukum Pers
13. Kategori Indeks Kemerdekaan Pers
 - 1) Peringkat 1 Provinsi Kepulauan Riau
 - 2) Peringkat 2 Provinsi Jawa Barat
 - 3) Peringkat 3 Provinsi Kalimantan Timur

Proses penyelenggaraan Anugerah Dewan Pers ini dimulai dengan konsultasi kepada Konstituen Dewan Pers dan Masyarakat Pers untuk merumuskan tujuan, kriteria dan kategori Anugerah Dewan Pers. Bahkan proses pengajuan nomine Anugerah Dewan Pers disampaikan oleh Konstituen Dewan Pers. Dari proses ini terdapat 117 media dengan ratusan karya jurnalistik, 45 wartawan dan 13 lembaga dan 20 tokoh. Akhirnya dewan juri mengajukan 41 nomine dari kategori media cetak, televisi, radio dan siber serta perorangan dan lembaga.

Sebanyak 41 nomine ini terjaring dari penilaian juri utama yang terdiri dari Bapak Mohammad Nuh, Ketua Umum PWI Atal S. Depari, Ketua Dewan Pers 2016-2019 Yosep Adi

BADAN PEKERJA PEMILIHAN ANGGOTA (BPPA) DEWAN PERS ----- PERIODE 2022 – 2025 -----

BPPA meminta masyarakat untuk memberikan masukan atas nama-nama calon anggota Dewan Pers tersebut. Masukan ditunggu hingga Kamis, 16 Desember 2021, yang dikirim ke alamat surat elektronik sekretariat@dewanpers.or.id atau ke alamat Sekretariat BPPA Dewan Pers, Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jl. Kebon Sirih No. 32 Jakarta Pusat (telp. 021-3504877-75).

Masukan akan ditindaklanjuti apabila menyertakan nama, identitas, dan nomor telepon sebagai bagian verifikasi keabsahan. BPPA menjamin kerahasiaan masukan BPPA dalam menetapkan calon anggota Dewan Pers pada Januari 2022.*

BADAN PEKERJA PEMILIHAN ANGGOTA (BPPA) DEWAN PERS ----- PERIODE 2022 – 2025 -----

Siaran Pers

BPPA Umumkan 18 Nama Calon Anggota Dewan Pers Periode 2022-2025

Jakarta - Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers mengumumkan 18 nama calon anggota Dewan Pers periode 2022-2025. Sebanyak 18 nama calon tersebut ditetapkan dalam rapat BPPA pada Kamis, (2/12/2021) di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, yang terdiri atas 6 calon dari unsur tokoh masyarakat, 6 calon dari unsur wartawan, dan 6 calon dari pimpinan perusahaan pers.

Berikut nama-nama calon Anggota Dewan Pers tersebut (berdasar urut abjad):

ENAM CALON ANGGOTA DEWAN PERS UNSUR TOKOH MASYARAKAT:

1. Asep Setiawan
2. Atmaji Supto Anggoro
3. Azyumardi Azra
4. Irwa R Zarkasi
5. Ninik Rahayu
6. Rajab Ritonga

ENAM CALON ANGGOTA DEWAN PERS UNSUR WARTAWAN:

1. Abdul Manan
2. Arif Zulkifli
3. Jamalul Insan
4. Paulus Tri Agung Kristanto
5. Wahyu Triyogo
6. Yadi Heriyadi Hendriana

ENAM CALON ANGGOTA DEWAN PERS UNSUR PIMPINAN PERUSAHAAN PERS:

1. Asmono Wikan
2. M Agung Dharmajaya
3. M Rafiq
4. Metta Dharma Saputra
5. Muhammad Nasir
6. Totok Suryanto

Mereka dipilih dari 28 nama bakal calon yang masuk ke BPPA hingga penutupan pendaftaran pada Jumat, 26 November 2021.



DEWANPERS



LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2021

LAPORAN PENGADUAN SELAMA BULAN SEPTEMBER 2021

Risalah No 111

Natalia Christanto (PT Bank Rakyat Indonesia) dengan sinarkeadilan.com

Risalah No 112

Indra Bonaparte dengan celebrities.id

Risalah No 113

Indra Bonaparte dengan fotokita.grid.id

Risalah No 114

Erie Ujie Anugrah dengan forumkeadilanbabel.com

Risalah No 115

Erie Ujie Anugrah dengan babelterkini.com

Risalah No 116

Erie Ujie Anugrah dengan sekilasindonesia.id

Risalah No 117

Erie Ujie Anugrah dengan radarbabel.co

Risalah No 118

Toni Limbong dengan shootlinenews.com

Risalah No 119

Toni Limbong dengan kabartujuhsatu.news

Risalah No 120

Toni Limbong dengan parlemenrakyat.id

Risalah No 121

Toni Limbong dengan anekafakta.com

Risalah No 122

Davitson Lambung dengan radarinvestigasi.id

SURAT

13 Surat

Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi

20 Surat

Surat Undangan Mediasi

65 Surat

Surat Keputusan/ penilaian akhir/ tanggapan

75 Surat

Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat

PPR: 44 PPR

terhadap Harian Media Bali atas pengaduan Arya Wedakarna

PPR: 42 PPR

terhadap beritabuana.co atas pengaduan Heru Hidayat

PPR: 45 PPR

terhadap roteterkini.com atas pengaduan Endang Sidin

PPR: 43 PPR

terhadap Majalah Keadilan Indonesia atas pengaduan Alvin Lim

PPR: 46 PPR

terhadap mediarealitas.com atas pengaduan Endang Sidin

DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN NOVEMBER 2021

JENIS MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	JUMLAH
					
Terverifikasi Administratif dan Faktual	10	1	2	72	85
Terverifikasi Administratif	1	0	0	8	9
Belum Terverifikasi	-	-	-	-	-
Media Mendata	-	-	-	-	-



DEWAN PERS

TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
1	Radarm Riau	Cetak	Riau
2	narasinews.id	Siber	Jawa Timur
3	lenteraesai.id	Siber	Bali
4	gerbangrepublik.com	Siber	Lampung
5	lampost.co	Siber	Lampung
6	Beritaibukota.com	Siber	Kepulauan Riau
7	kedannews.com	Siber	Sumatera Utara
8	ampar.id	Siber	Jambi
9	banjarmasinpost.co.id	Siber	Kalimantan Selatan

TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF & FAKTUAL

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
1.	Rakyat News	Cetak	Lampung
2.	Dumai Pos	Cetak	Riau
3.	Metro Sulawesi	Cetak	Sulawesi Tengah
4.	Berau Post	Cetak	Kalimantan Timur
5.	Harian Pagi Memo X	Cetak	Jawa Timur
6.	Lahat Pos	Cetak	Sumatera Selatan
7.	Enim Ekspres	Cetak	Sumatera Selatan
8.	Ambon Ekspres	Cetak	Maluku
9.	Koran Seruya	Cetak	Sulawesi Selatan
10.	Berita metro	Cetak	Jawa Timur
11.	Star FM	Radio	DI Yogyakarta
12.	ignnews.id	Siber	Kepulauan Riau
13.	rm.id	Siber	DKI Jakarta
14.	metropublik.com	Siber	Sumatera Utara
15.	sumut24.co	Siber	Sumatera Utara
16.	penarakyat.com	Siber	Sulawesi Selatan
17.	terdepan.co.id	Siber	Kepulauan Riau
18.	ligo.id	Siber	Gorontalo
19.	harianjogja.com	Siber	DI Yogyakarta
20.	Murianews.com	Siber	Jawa Tengah
21.	segmennews.com	Siber	Riau
22.	Monitorriau.com	Siber	Riau
23.	enimekspres.co.id	Siber	Sumatera Selatan
24.	era.id	Siber	DKI Jakarta
25.	balanganews.com	Siber	Kalimantan Tengah
26.	Lensabangkabelitung.com	Siber	Kepulauan Bangka Belitung

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
27.	kanal9.id	Siber	Jawa Tengah
28.	radarjogja.jawapos.com	Siber	DI Yogyakarta
29.	Sariagri.id	Siber	DKI Jakarta
30.	humabetang.com	Siber	Kalimantan Tengah
31.	sigijateng.id	Siber	Jawa Tengah
32.	Riau1.com	Siber	Riau
33.	PredikatNews.com	Siber	Lampung
34.	sudutpandang.id	Siber	DKI Jakarta
35.	monitorindonesia.com	Siber	DKI Jakarta
36.	Koranseruya.com	Siber	Sulawesi Selatan
37.	suarapublik.id	Siber	Sumatera Selatan
38.	Mediatrias.com	Siber	Kepulauan Riau
39.	mitratoday.com	Siber	Bengkulu
40.	detikglobalnews.com	Siber	Kepulauan Riau
41.	gerbangindonesia.co.id	Siber	Nusa Tenggara Barat
42.	halosulsel.com	Siber	Sulawesi Selatan
43.	beritanasional.id	Siber	Sulawesi Selatan
44.	Tekape.co	Siber	Sulawesi Selatan
45.	rakyat.news	Siber	Sulawesi Selatan
46.	NusaDaily.com	Siber	Jawa Timur
47.	Kabardesa.co.id	Siber	Sulawesi Selatan
48.	infosulawesi.com	Siber	Sulawesi Selatan
49.	jatimsmart.id	Siber	Jawa Timur
50.	bangsaonline.com	Siber	Jawa Timur
51.	faktabanten.co.id	Siber	Banten
52.	Pesanku.co.id	Siber	Sulawesi Selatan
53.	Klikjatim.com	Siber	Jawa Timur
54.	Beritabangsa.com	Siber	Jawa Timur
55.	megapolitanpos.com	Siber	DKI Jakarta
56.	Ritmee.co.id	Siber	Sulawesi Selatan
57.	liputanoke.com	Siber	Riau
58.	okesulsel.com	Siber	Sulawesi Selatan
59.	teraskata.com	Siber	Sulawesi Selatan
60.	Mediabahaya.com	Siber	Sulawesi Selatan
61.	lintascebebes.com	Siber	Sulawesi Selatan
62.	palopopos.co.id	Siber	Sulawesi Selatan
63.	Bataminfo.co.id	Siber	Kepulauan Riau
64.	wajoterkini.com	Siber	Sulawesi Selatan
65.	JATIMNOW.COM	Siber	Jawa Timur
66.	penapost.id	Siber	Aceh
67.	blokbojonegoro.com	Siber	Jawa Timur
68.	blokTuban.com	Siber	Jawa Timur
69.	matatelinga.com	Siber	Sumatera Utara
70.	Memontum.com	Siber	Jawa Timur
71.	suarasiber.com	Siber	Kepulauan Riau
72.	Selasar.co	Siber	Kalimantan Timur
73.	Jalurnews.com	Siber	Kepulauan Riau
74.	mimbarpublik.com	Siber	Kepulauan Riau
75.	bacaini.id	Siber	Jawa Timur
76.	kepribetter.com	Siber	Kepulauan Riau
77.	Katasatu.co.id	Siber	Sulawesi Selatan
78.	kabar6.com	Siber	Banten
79.	Radarmandalika.id	Siber	Nusa Tenggara Barat
80.	bogordaily.net	Siber	Jawa Barat
81.	klikmetro.com	Siber	Sumatera Utara
82.	Berkabarnews.com	Siber	Riau
83.	suaraserumpun.com	Siber	Kepulauan Riau
84.	Dayak TV	Televisi	Kalimantan Tengah
85.	JTV Madiun	Televisi	Jawa Timur



DEWAN Pers saat Melaksanakan Konsinyering Media Sustainability yang turut di hadiri oleh Dirjen IKP, Usman Kansong pada Senin (6/12) di Tangerang Selatan, Banten. ●





DEWAN Pers saat menggelar Rapat Seleksi Pelaksana Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2022 serta Pengumpulan Data Sekunder pada Jumat (10/12) di Tangerang Selatan, Banten. ●



ANGGOTA Dewan Pers, Agus Sudibyo (tengah) saat melaksanakan Sosialisasi tentang Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (ASKAB) pada Sabtu (11/12) di Banyuwangi, Jawa Timur. ●



ANGGOTA Dewan Pers, Jamalul Insan (paling depan kedua dari kiri) bersama para calon penguji UKW berfoto bersama usai kegiatan pelatihan Training untuk Trainer Calon Penguji dan Administrator Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Universitas Dr Soetomo pada Sabtu (11/12) di Surabaya, Jawa TImur. ●



WAKIL Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (batik abu-abu) bersama Anggota Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya (batik hitam) saat menyerahkan Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2021 ke Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada Senin (13/12) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.●



WAKIL Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (kedua dari kanan) bersama Anggota Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya (ketiga dari kiri) saat melaksanakan sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers 2021 pada Senin (13/12) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.●



ANGGOTA Dewan Pers Hassanein Rais (kiri) menjadi narasumber dalam sesi pertama acara Webinar Edukasi dan Literasi Keamanan Informasi Sektor Media kerjasama Dewan Pers bersama Badan Siber dan Sandi Negara pada Selasa (14/12) di Jakarta. ●



ANGGOTA Dewan Pers, Agus Sudibyo selaku Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, menerima Audiensi Corporate Communications Pertamina, Fajriah bersama tim pada Kamis (16/12) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.. ●



DEWAN Pers saat pelaksanaan Konsinyering Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi yang berlangsung pada (17/12) di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. ●



ANGGOTA Dewan Pers M. Agung Dharmajaya (tengah) membuka Diskusi Implementasi Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terkait Penanganan Kasus Kekerasan Wartawan pada Rabu (29/12) di Tangerang Selatan, Banten. ●



Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli dan Hassanein Rais hadir dalam acara Penyusunan Laporan Tahunan Dewan Pers 2021 pada Rabu (29/12) di Tangerang Selatan, Banten. ●